

SKRIPSI

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG
(Studi Kasus Tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran)**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memeperoleh Gelar Sajana Hukum

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS
MUHAMMAD AKIL RAMDANI

NIM. 2010113101

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

	No. Alumni Universitas	Muhammad Akil Ramdani	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang/ 07 November 2002 b. Nama Orangtua : Nasrul & Wirna Dwi Novianti c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2010113101	f. Tanggal Lulus : 20 Agustus 2024 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan i. IPK : 3.70 j. Alamat : Jalan Napak Tilas Sungai Bangek, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang	

**PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PADANG**

(Studi Kasus Tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran)


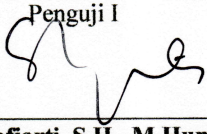
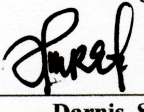
(Muhammad Akil Ramdani 2010113101, Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara (PK VII), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 halaman + viii halaman, 2024)

ABSTRAK

Pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun Undang-Undang ini direvisi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK serta dokumen kependudukan, masih terdapat banyak permasalahan terkait pelayanan tersebut, termasuk kesalahan input data yang berpotensi mengakibatkan informasi pribadi yang tidak akurat dan identitas ganda, terutama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Penelitian ini membahas dua rumusan masalah, *Pertama*, bagaimana pelaksanaan administrasi kependudukan bidang pelayanan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang?. *Kedua*, bagaimana permasalahan serta hambatan dalam pelayanan administrasi kependudukan bidang pelayanan akta kelahiran dan kartu keluarga di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang?. Untuk dapat membahas permasalahan tersebut maka digunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, Penelitian terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Padang menemukan implementasi SOP yang terstruktur dalam proses penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, terdapat temuan potensi kesalahan terkait manipulasi data oleh pemohon, seperti pemalsuan informasi mengenai hubungan keluarga, yang berpotensi berdampak hukum. Disdukcapil tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi data yang sudah diterbitkan tanpa proses hukum. Meskipun begitu, lembaga ini aktif dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pegawai serta memastikan ketaatan terhadap SOP, baik secara langsung maupun daring. *Kedua*, Analisis pelayanan publik di Indonesia mengidentifikasi berbagai permasalahan seperti kurangnya responsivitas, informativitas, aksesibilitas terbatas, koordinasi yang kurang baik, birokrasi kompleks, dan tantangan sumber daya manusia yang kurang profesional. Di Kantor Disdukcapil Kota Padang, hambatan utama dalam pelayanan administrasi kependudukan meliputi kekurangan sarana, dukungan minim untuk peningkatan kemampuan SDM, dan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan.


Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 20 Agustus 2024. Penguji,

Tanda Tangan 	Penguji I 	Penguji II 
Muhammad Akil Ramdani	Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.	Darnis, S.H., M.H.

Mengetahui,


Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. University Alumni	Muhammad Akil Ramdani	No. Faculty Alumni						
	a. Place/Date of Birth : Padang/ 07 November 2002	b. Parents Name : Nasrul & Wirna Dwi Novianti	c. Faculty : Law	d. Concentratio : Administration Law	e. No. BP : 2010113101	f. Graduation Date : 20 August 2024	g. Predicate : With Honours	h. Length of Study : 4 Years 0 Months	i. GPA : 3.70

POPULATION ADMINISTRATION SERVICES AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF PADANG CITY

(Case Study on Family Card and Birth Certificate Services)


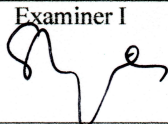
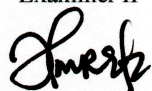
(Muhammad Akil Ramdani, 2010113101, Concentration Program Administration Law (CP VII), Faculty of Law, Andalas University, 91 pages + viii pages, 2024)

ABSTRACT

The administration of population services in Indonesia is governed by the provisions set forth in Law Number 24 of 2013, which amends the provisions set forth in Law Number 23 of 2006 on Population Administration. Despite the amendments introduced to enhance the efficacy of the services and guarantee the precision and singularity of NIK and population documentation, numerous challenges persist. These include data input errors, which have the potential to result in inaccurate personal information and multiple identities, particularly within the Population and Civil Registration Office of Padang City. This research presents two problem formulations. The first concerns the implementation of population administration in the context of family card and birth certificate services at the Population and Civil Registration Office in Padang City. The second addresses the challenges and impediments encountered in the provision of population administration services in the domain of birth certificate and family card services at the aforementioned office. In order to facilitate discussion of these issues, empirical juridical research methods are employed. The results of the research and discussion are as follows: The initial investigation into the administration of population services at the Disdukcapil of Padang City revealed the implementation of structured standard operating procedures (SOPs) in the issuance of family cards and birth certificates, in accordance with the prevailing regulations. However, the research also revealed instances of potential data manipulation by applicants, such as the falsification of information about family relationships. This could have legal implications. It should be noted that the Disdukcapil does not have the authority to correct data that has already been issued without a legal process. However, it is engaged in the monitoring and evaluation of employee performance and the assurance of adherence to standard operating procedures, both in person and online. Secondly, an analysis of public services in Indonesia revealed a number of issues, including a lack of responsiveness, informativeness, limited accessibility, poor coordination, complex bureaucracy, and the challenge of unprofessional human resources. At the Disdukcapil Office in Padang City, the primary obstacles to civil registration services include a lack of facilities, minimal support for human resource capacity building, and the need to improve service quality.

Keywords: Public Services, Family Card, Birth Certificate.

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by August, 20th 2024 Examiner,

Signature 	Examiner I 	Examiner II 
Muhammad Akil Ramdani	Dr. Syofiarti, S.H., M.Hum.	Darnis, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Departement of State Administration Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University Under the number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty:	Name:	Signature :
No. Alumni University:	Name:	Signature :